



KONTRIBUSI ZAKAT DAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF

RR Tini Anggraeni

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The study analyzed the contribution of zakat and socio-economic factors to inclusive economic development in districts/cities. The research uses the variables of the inclusive economic development index which consists of 3 main pillars, namely the economic growth index, poverty and inequality, as well as the expansion of access and opportunity as the bound variables and religious social funds (productive zakat, zakat fitrah, alms infaq and other religious social funds) (DSKL) which are controlled by regional socio-economic factors such as regional income, GDP, the number of population, as well as the area area as the independent variables. The results of the study show that Pillar 1 (economic growth), zakat fitrah has a significant positive effect, while other socio-religious funds have a significant negative effect, indicating that zakat fitrah contributes to inclusive growth. Pillar 2 (poverty and inequality) and Pillar 3 (expanding access and opportunities). Regional revenue is the only variable that has a significant positive effect, confirming that the fiscal capacity of local governments is the main determinant in reducing inequality and expanding access to public services. Comparatively, the results of the study show that socio-religious funds are more sensitive to economic growth, while regional fiscal policies play a dominant role in structural improvement of welfare. These findings underscore the importance of synergy between fiscal policy and socio-religious funds in fostering sustainable inclusive economic development.

Keywords: Inclusive economy; Zakat, Social Religious Fund, Socio-Economic, Panel Regression.

ABSTRAK

Penelitian menganalisis kontribusi zakat dan faktor sosial ekonomi terhadap pembangunan ekonomi inklusif di kabupaten/kota. Penelitian menggunakan variabel indeks pembangunan ekonomi inklusif yang terdiri dari 3 pilar utama yaitu indeks pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, serta perluasan akses dan kesempatan sebagai variabel terikatnya dan dana sosial keagamaan (zakat produktif, zakat fitrah, infaq sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya) (DSKL) yang di kontrol dengan faktor sosial ekonomi wilayah seperti pendapatan daerah, PDRB, jumlah penduduk, serta luas wilayah sebagai variabel bebasnya. Hasil penelitian menunjukkan Pilar 1 (pertumbuhan ekonomi), zakat fitrah berpengaruh positif signifikan, sedangkan dana sosial keagamaan lainnya berpengaruh negatif signifikan, mengindikasikan bahwa zakat fitrah berkontribusi terhadap pertumbuhan yang inklusif. Pilar 2 (kemiskinan dan ketimpangan) serta Pilar 3 (perluasan akses dan kesempatan). Pendapatan daerah menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh positif signifikan, menegaskan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah merupakan determinan utama dalam pengurangan ketimpangan dan perluasan akses layanan publik. Secara komparatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana sosial keagamaan lebih sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan fiskal daerah berperan dominan dalam perbaikan struktural kesejahteraan. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan dana sosial keagamaan dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Inklusif; Zakat, Dana Sosial Keagamaan, Sosial Ekonomi, Regresi Panel.

Copyright (c) 2025 RR Tini Anggraeni.

✉ Corresponding author : RR Tini Anggraeni

Email Address : tinianggraeni@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah paradigma pembangunan yang tidak hanya menekankan peningkatan output ekonomi, tetapi juga pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat dan antarwilayah. Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan karakteristik wilayah yang heterogen, tantangan pembangunan tidak hanya terletak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga pada penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta pemerataan kesejahteraan antar kota dan kabupaten. Perbedaan jumlah penduduk, luas wilayah, kapasitas fiskal daerah, serta tingkat kemiskinan menciptakan variasi kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam kerangka tersebut, zakat, infaq, sedekah, zakat fitrah, dan dana sosial keagamaan lainnya memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi ekonomi berbasis masyarakat. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang efektif berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan multidimensional serta peningkatan pertumbuhan ekonomi regional (Siregar et al., 2024; Safitri et al., 2024). ZIS tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal produktif yang mampu meningkatkan daya beli, memperkuat usaha mikro, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, dana sosial keagamaan berpotensi menjadi pelengkap kebijakan fiskal daerah dalam memperluas akses ekonomi bagi kelompok rentan dan miskin.

Namun demikian, efektivitas peran zakat dan dana sosial keagamaan sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural wilayah. Studi spasial menunjukkan bahwa konsentrasi distribusi zakat yang tidak merata dapat menimbulkan fenomena *over-concentration*, yaitu perputaran dana yang terpusat pada wilayah tertentu sementara wilayah lain yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi justru kurang terlayani (Haq, 2025). Oleh karena itu, faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat PDRB, jumlah penduduk miskin, dan pendapatan daerah menjadi variabel penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan distribusi zakat agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Wilayah dengan populasi besar dan tingkat kemiskinan tinggi membutuhkan intervensi distribusi yang lebih terarah, sementara kapasitas pendapatan daerah menentukan kemampuan pemerintah dalam bersinergi dengan lembaga zakat untuk memperluas program pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, integrasi antara zakat dan kebijakan pembangunan daerah menjadi semakin relevan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa distribusi zakat yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi dan spasial wilayah dapat memperkuat dampak inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi (Majid & Gissay, 2024). Dengan kata lain, zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat menjadi instrumen strategis dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah apabila dikelola secara terkoordinasi dan berbasis data.

Penelitian mengenai pengaruh zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif menjadi penting karena zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, menekan

ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Melalui distribusi zakat kepada kelompok mustahik, sumber daya ekonomi dapat dialirkan dari kelompok berpendapatan tinggi kepada kelompok yang kurang mampu sehingga mampu meningkatkan daya beli, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program zakat produktif yang mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik (Nurul Huda et al., 2015; Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, 2016).

Zakat memiliki peran strategis karena dapat menjadi instrumen pelengkap kebijakan fiskal pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Konsep pembangunan ekonomi inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kesempatan ekonomi, pengurangan ketimpangan, serta pemerataan akses terhadap layanan publik dan sumber daya ekonomi. Secara konseptual, pembangunan ekonomi inklusif umumnya diukur melalui tiga pilar utama, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta (3) perluasan akses dan kesempatan ekonomi. Pilar pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja. Pilar kemiskinan dan ketimpangan berfokus pada distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata. Sementara itu, pilar perluasan akses dan kesempatan menekankan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat (World Bank, 2018).

Dalam kerangka tersebut, zakat dapat berkontribusi pada ketiga pilar pembangunan ekonomi inklusif. Pertama, zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan dukungan terhadap usaha mikro mustahik. Kedua, zakat berperan langsung dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui redistribusi pendapatan dari muzakki kepada mustahik. Ketiga, melalui program pemberdayaan seperti zakat produktif, zakat dapat memperluas akses masyarakat miskin terhadap modal usaha, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa integrasi zakat dengan program pembangunan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan dan memperkuat inklusivitas pertumbuhan ekonomi (Mohammad Nizarul Alim et al., 2020).

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh zakat terhadap pembangunan ekonomi inklusif menjadi penting untuk memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana dana sosial keagamaan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses ekonomi bagi masyarakat. Analisis ini juga dapat memberikan dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah dan lembaga

pengelola zakat untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi inklusif di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan panel memungkinkan identifikasi variasi antar daerah (cross-section) sekaligus dinamika perubahan dari waktu ke waktu (time series), sehingga mampu menghasilkan estimasi yang lebih robust dibandingkan data cross-section atau time series saja.

Dalam kerangka konseptual ini, pembangunan ekonomi inklusif diposisikan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh dua kelompok utama variabel independen, yaitu zakat, dana sosial keagamaan lainnya, zakat fitrah, dana infaq sedekah dan factor sosial ekonomi wilayah yang mencakup Jumlah penduduk, Luas wilayah, jumlah penduduk miskin, PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator pembangunan ekonomi inklusif yang digunakan merujuk pada data indeks pembangunan ekonomi inklusif yang disusun oleh kementerian Bappenas. Adapun rincian indeks pembangunan ekonomi inklusif yang digunakan terdiri dari 3 pilar utama yaitu Indeks Pertumbuhan Ekonomi (Pilar 1) sebagai variabel Y1, Indeks Kemiskinan dan Ketimpangan (Pilar 2) sebagai variabel Y2, dan Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan (Pilar 3) sebagai variabel Y3.

Instrumen redistribusi sosial keagamaan meliputi zakat, infaq, sedekah, zakat fitrah, dan dana sosial keagamaan lainnya adalah mekanisme transfer pendapatan dari kelompok mampu kepada kelompok rentan. Secara teoritis, peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana sosial keagamaan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan konsumsi, akses modal usaha produktif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, variabel sosial ekonomi wilayah seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan daerah mencerminkan kapasitas ekonomi dan fiskal suatu wilayah. PDRB yang lebih tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih besar, sementara pendapatan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Keduanya diasumsikan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif karena mampu memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar.

Jumlah penduduk dan luas wilayah juga dimasukkan sebagai variabel kontrol yang memengaruhi dinamika pembangunan daerah. Jumlah penduduk berkaitan dengan potensi tenaga kerja dan ukuran pasar, namun juga dapat meningkatkan tekanan terhadap penyediaan layanan publik. Luas wilayah mencerminkan tantangan distribusi pembangunan dan efektivitas program sosial di wilayah yang secara geografis lebih luas.

Dengan menggunakan model regresi data panel – baik melalui pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), maupun Random Effect Model (REM) penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh langsung dana sosial keagamaan dan variabel karakteristik wilayah

terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemilihan model terbaik akan ditentukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM).

Secara keseluruhan, kerangka konseptual ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat merupakan hasil interaksi antara efektivitas redistribusi dana sosial keagamaan dan kapasitas ekonomi daerah yang diamati secara dinamis dalam periode waktu tertentu. Berikut adalah persamaan regresi data panel per masing-masing pilar pembangunan ekonomi inklusif.

$$\text{Pilar_1it} = \beta_0(\text{uivi}) + \beta_1(\text{uivi}) \text{ Zakatit} + \beta_2(\text{uivi}) \text{ DSKLit} + \beta_3(\text{uivi}) \text{ Fitrahit} + \beta_4(\text{uivi}) \text{ Pendudukit} + \beta_5(\text{uivi}) \text{ Luas_wilit} + \beta_6(\text{uivi}) \text{ PDRBit} + \beta_7(\text{uivi}) \text{ Miskinit} + \beta_8(\text{uivi}) \text{ PADit} + \beta_9(\text{uivi}) \text{ Sdkh_Infaqit}$$

$$\text{Pilar_2it} = \alpha_0(\text{uivi}) + \alpha_1(\text{uivi}) \text{ Zakatit} + \alpha_2(\text{uivi}) \text{ DSKLit} + \alpha_3(\text{uivi}) \text{ Fitrahit} + \alpha_4(\text{uivi}) \text{ Pendudukit} + \alpha_5(\text{uivi}) \text{ Luas_wilit} + \alpha_6(\text{uivi}) \text{ PDRBit} + \alpha_7(\text{uivi}) \text{ Miskinit} + \alpha_8(\text{uivi}) \text{ PADit} + \alpha_9(\text{uivi}) \text{ Sdkh_Infaqit}$$

$$\text{Pilar_3it} = \gamma_0(\text{uivi}) + \gamma_1(\text{uivi}) \text{ Zakatit} + \gamma_2(\text{uivi}) \text{ DSKLit} + \gamma_3(\text{uivi}) \text{ Fitrahit} + \gamma_4(\text{uivi}) \text{ Pendudukit} + \gamma_5(\text{uivi}) \text{ Luas_Wilit} + \gamma_6(\text{uivi}) \text{ PDRBit} + \gamma_7(\text{uivi}) \text{ Miskinit} + \gamma_8(\text{uivi}) \text{ PADit} + \gamma_9(\text{uivi}) \text{ Sdkh_Infaqit}$$

Model ini merupakan model utama (main regression model) yang menguji pengaruh keseluruhan variabel terhadap indeks inklusivitas pembangunan ekonomi.

- $i=1,2,\dots$, kabupaten/kota di Jawa Barat
- $t=1,2,\dots$ periode waktu

Variabel independen:

Pillars 1	: Indeks Pertumbuhan Ekonomi
Pillars 2	: Indeks Kemiskinan dan Ketimpangan
Pillars 3	: Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan
$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_9$	: Konstanta and Koef variabel pada kota/kab pada tahun tertentu
Pilar 1 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_9$	: Konstanta and Koef variable pada kota/kab pada tahun tertentu
Pilar 2 $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_9$	: Konstanta and Koef variabel pada kota/kab pada tahun tertentu
Pilar 3 $\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_7$	: Konstanta and Koef variabel pada kota/kab pada tahun tertentu
Zakat	: Jumlah zakat yang disalurkan pada kota/kab pada tahun tertentu
DSKL	: Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada kota/kab pada tahun tertentu
Fitrah	: Zakat fitrah pada kota/kabupaten pada tahun tertentu
Penduduk	: Jumlah Penduduk pada kota/kabupaten pada tahun tertentu
Luas_wil	: Luas wilayah kota/kabupaten pada tahun tertentu
PDRB	: Produk Domestik Bruto pada kota/kabupaten pada tahun tertentu

Miskin : Jumlah penduduk miskin pada kota/kabupaten pada tahun tertentu
PAD : Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kota/kabupaten pada tahun tertentu
Sdkh_Infaq : Sedekah Infaq pada kota/kabupaten pada tahun tertentu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil per masing-masing pilar pembangunan ekonomi inklusif yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu pilar 1 (pertumbuhan ekonomi), pilar 2 (pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan) dan pilar 3 (perluasan akses dan kesempatan). Artinya kontribusi zakat lebih berkontribusi pada pilar 1, pilar 2 atau pilar 3. Dari pengujian 3 metode panel dari common effect model, fixed effect model dan random effect model, diperoleh hasil bahwa model yang terpilih adalah fixed effect model. Sehingga yang ditampilkan dalam artikel ini adalah output fixed effect model.

Pilar 1. Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: PILAR1 Method: Panel Least Squares Date: 12/05/24 Time: 01:45 Sample: 2019 2022 Periods included: 4 Cross-sections included: 26 Total panel (unbalanced) observations: 87				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.251609	0.651682	6.524059	0.0000
DSKL	-2.40E-08	8.62E-10	-27.79899	0.0000
FITRAH	3.98E-12	1.89E-12	2.099774	0.0406
JUMLAHPENDUDUK	0.000238	0.000175	1.359938	0.1797
LUASWILAYAH	0.000211	0.000374	0.563876	0.5753
PDRB	2.90E-09	4.03E-08	0.071980	0.9429
PENDUDUKMISKIN	0.000215	0.000474	0.453936	0.6518
PNDPTNDAERAH	1.66E-11	2.09E-11	0.794787	0.4304
SEDEKAH_INFAQ	-2.17E-11	1.72E-11	-1.261555	0.2127
ZAKAT	3.76E-12	3.32E-12	1.133528	0.2622
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.973661	Mean dependent var	5.024943	
Adjusted R-squared	0.956439	S.D. dependent var	0.738650	
S.E. of regression	0.154165	Akaike info criterion	-0.611648	
Sum squared resid	1.235882	Schwarz criterion	0.380384	
Log likelihood	61.60671	Hannan-Quinn criter.	-0.212188	
F-statistic	56.53683	Durbin-Watson stat	3.257694	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Secara simultan seluruh variable dana sosial keagamaan, zakat fitrah, jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, jumlah penduduk miskin, pendapatan daerah, dana infaq sedekah dan zakat berpengaruh signifikan terhadap pilar 1 pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat secara parsial, variabel Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) memiliki koefisien negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DSKL justru berkorelasi dengan penurunan nilai Pilar 1. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana sosial tersebut belum sepenuhnya bersifat produktif atau belum secara langsung mendorong aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada pertumbuhan. Sebaliknya, variabel zakat fitrah (FITRAH) berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat 5%, yang berarti peningkatan zakat fitrah

berkaitan dengan peningkatan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif, meskipun besarnya pengaruh relatif kecil.

Sementara itu, variabel jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, jumlah penduduk miskin, pendapatan daerah, sedekah/infaq, dan zakat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Pilar 1. Ketidaksignifikanan PDRB dan pendapatan daerah cukup menarik, karena secara teoritis kedua variabel tersebut merupakan indikator utama kapasitas ekonomi wilayah. Kondisi ini dapat terjadi karena variasi antar daerah telah banyak ditangkap oleh efek tetap (*fixed effect*), atau adanya korelasi tinggi antar variabel yang mengurangi signifikansi parsial masing-masing variabel.

Hasil estimasi regresi panel pada Pilar 1 (Indeks Pertumbuhan Ekonomi) menunjukkan bahwa Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan zakat fitrah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif antar kabupaten/kota Jawa Barat. Temuan bahwa sebagian instrumen dana sosial keagamaan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sejalan dengan hasil penelitian empiris sebelumnya yang menunjukkan kontribusi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional ketika dikelola secara produktif. Sebagai contoh, studi panel data di 34 provinsi Indonesia menemukan bahwa ZIS tidak hanya efektif dalam mengurangi kemiskinan multi dimensional, tetapi juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, menunjukkan peran ganda sebagai mekanisme redistribusi dan pendorong aktivitas ekonomi (Siregar *et al.*, 2025).

Namun, koefisien negatif pada DSKL dalam model ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dana sosial lainnya masih bersifat konsumtif atau kurang diarahkan pada program yang mendorong produktivitas ekonomi secara langsung, yang berbeda dengan harapan teori pembangunan inklusif. Hal ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada orientasi pengelolaannya sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kuat jika diarahkan ke pemberdayaan dan modal usaha (Hasanah *et al.*, 2025).

Selain itu, ketidaksignifikanan variabel PDRB dan pendapatan daerah terhadap Pilar 1 mencerminkan temuan lain dalam literatur pembangunan inklusif yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi agregat tidak selalu berimplikasi langsung pada peningkatan indikator inklusif jika tidak disertai kebijakan redistribusi dan pemerataan kapasitas ekonomi lokal. Beberapa penelitian juga menguatkan bahwa meskipun zakat dan instrumen filantropi Islam dapat memperkuat konsumsi rumah tangga dan memperkecil kesenjangan sosial, efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang sering kali memerlukan integrasi dengan kebijakan fiskal pemerintah dan strategi pembangunan yang lebih luas (Safitri *et al.*, 2024).

Hasil estimasi regresi data panel menggunakan pendekatan **Fixed Effect Model (FEM)** menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat. Nilai R-squared sebesar 0,973661 dan Adjusted R-squared sebesar 0,956439 mengindikasikan bahwa sekitar 95,64% variasi Indeks Pilar 1

(Pertumbuhan Ekonomi) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak secara statistik untuk menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi inklusif antar kabupaten/kota selama periode 2019–2022.

Secara keseluruhan, temuan Pilar 1 memperlihatkan bahwa peran dana sosial keagamaan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif bersifat kompleks: sebagian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama ketika diarahkan secara produktif, namun efeknya berbeda tergantung pada karakter dan pengelolaan masing-masing instrumen. Hasil ini memperkuat argumen dalam literatur bahwa kontribusi zakat dan instrumen sosial ekonomi lainnya terhadap pertumbuhan harus dilihat dalam konteks orientasi distribusi dan kualitas pengelolannya.

Pilar 2. Penguranga Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Dependent Variable: PILAR2				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/04/24 Time: 23:33				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 26				
Total panel (unbalanced) observations: 87				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.475826	6.658512	0.522012	0.6039
DSKL	-9.81E-09	8.81E-09	-1.113467	0.2706
FITRAH	1.34E-11	1.94E-11	0.694025	0.4908
JUMLAHPENDUDUK	-0.000128	0.001787	-0.071603	0.9432
LUASWILAYAH	-0.001427	0.003826	-0.372924	0.7107
PDRB	-5.36E-07	4.12E-07	-1.300031	0.1993
PENDUDUKMISKIN	-0.002286	0.004844	-0.471903	0.6390
PNDPTNDAERAH	1.45E-09	2.13E-10	6.818773	0.0000
SEDEKAH_INFAQ	-2.79E-10	1.76E-10	-1.587020	0.1186
ZAKAT	2.58E-11	3.39E-11	0.760527	0.4504
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.830835	Mean dependent var	4.516897	
Adjusted R-squared	0.720228	S.D. dependent var	2.978010	
S.E. of regression	1.575174	Akaike info criterion	4.036542	
Sum squared resid	129.0210	Schwarz criterion	5.028574	
Log likelihood	-140.5896	Hannan-Quinn criter.	4.436003	
F-statistic	7.511552	Durbin-Watson stat	0.710606	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari output diatas dapat dijelaskan secara simultan seluruh variable bebas yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pilar 3 pembangunan ekonomi inklusif. Hal ini dapat dilihat dari nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,0000. Secara parsial, hanya variabel Pendapatan Daerah yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% (p-value 0,0000). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah berkorelasi dengan peningkatan nilai indeks Pilar 2 (Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan). Hasil ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah berperan penting dalam memperbaiki kondisi distribusi kesejahteraan. Artinya semakin besar kemampuan fiskal daerah, semakin baik upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang dapat dilakukan melalui program sosial dan pembangunan.

Sementara itu, variabel Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), zakat fitrah, jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, jumlah penduduk miskin, sedekah/infak, dan zakat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Pilar 2. Meskipun beberapa variabel memiliki arah koefisien

yang sesuai dengan teori, seperti variable PDRB dan DSKL yang bernilai negative, namun secara empiris pengaruh tersebut belum cukup kuat dalam periode pengamatan yang relatif singkat. Ketidaksignifikanan dana sosial keagamaan dapat mengindikasikan bahwa distribusinya belum secara langsung berdampak pada indikator kemiskinan dan ketimpangan yang diukur dalam Pilar 2, atau pengaruhnya memerlukan horizon waktu yang lebih panjang untuk terlihat secara statistik.

Hasil estimasi regresi data panel menggunakan pendekatan **Fixed Effect Model (FEM)** dengan efek tetap antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa model secara umum signifikan dan layak digunakan. Nilai R-squared sebesar 0,830835 dan Adjusted R-squared sebesar 0,720228 mengindikasikan bahwa sekitar 72% variasi Indeks Pilar 2 dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Pilar 2, kapasitas fiskal daerah menjadi faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap perbaikan kemiskinan dan ketimpangan, sementara variabel dana sosial keagamaan dan indikator ekonomi lainnya belum menunjukkan pengaruh yang kuat secara parsial dalam periode penelitian.

Hasil regresi panel pada Pilar 2 menunjukkan bahwa hanya variabel pendapatan daerah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kemiskinan dan ketimpangan, sementara variabel dana sosial keagamaan (zakat, zakat fitrah, sedekah/infak, dan dana sosial keagamaan lainnya), PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah, serta jumlah penduduk miskin tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah merupakan faktor utama dalam memperbaiki kondisi kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah memperluas program perlindungan sosial, subsidi publik, dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa belanja dan kapasitas fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Studi oleh Badrudin dan Khasanah (2019) dalam *Economic Journal of Emerging Markets* menemukan bahwa pendapatan dan belanja pemerintah daerah memiliki kontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan kualitas layanan publik dan program sosial. Demikian pula, penelitian Sodik (2017) menunjukkan bahwa kinerja fiskal daerah berperan penting dalam mengurangi ketimpangan regional, terutama ketika alokasi anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen empiris bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan determinan struktural utama dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Di sisi lain, ketidaksignifikanan variabel dana sosial keagamaan terhadap Pilar 2 memberikan perspektif yang lebih kontekstual dibandingkan sebagian penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa zakat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Beberapa studi, seperti Beik dan Arsyianti (2015),

menunjukkan bahwa zakat efektif dalam menurunkan kemiskinan pada tingkat rumah tangga mustahik. Namun, dampak tersebut sering kali bersifat mikro dan tidak selalu langsung tercermin dalam indikator kemiskinan makro tingkat kabupaten/kota, terutama dalam periode waktu yang relatif singkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun zakat memiliki peran penting dalam redistribusi pendapatan, skalanya mungkin belum cukup besar untuk memengaruhi indikator kemiskinan regional secara agregat tanpa dukungan kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Ketidaksignifikan PDRB dalam model menguatkan temuan dalam literatur pembangunan inklusif bahwa pertumbuhan ekonomi agregat tidak otomatis menurunkan kemiskinan dan ketimpangan apabila tidak disertai kebijakan redistributif yang efektif. Sejumlah penelitian internasional mengenai inclusive growth menegaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh struktur distribusi pendapatan dan efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks kabupaten/kota, kapasitas fiskal daerah memiliki peran yang lebih nyata dalam memperbaiki indikator kemiskinan dibandingkan besarnya output ekonomi semata.

Secara keseluruhan, analisis Pilar 2 menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan lebih banyak ditentukan oleh kebijakan fiskal dan kapasitas anggaran pemerintah daerah dibandingkan oleh instrumen dana sosial keagamaan secara langsung. Temuan ini memperkuat literatur yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pembangunan inklusif, sementara dana sosial keagamaan berperan sebagai instrumen pelengkap dalam mendukung kesejahteraan masyarakat rentan.

Pilar 3. Perluasan Akses dan Kesempatan

Sample: 2019 2022

Periods included: 4

Cross-sections included: 26

Total panel (unbalanced) observations: 87

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.123170	6.996921	0.303444	0.7628
DSKL	-6.27E-09	9.26E-09	-0.677631	0.5010
FITRAH	1.25E-11	2.03E-11	0.614925	0.5413
JUMLAHPENDUDUK	5.23E-05	0.001878	0.027830	0.9779
LUASWILAYAH	-0.000766	0.004021	-0.190498	0.8497
PDRB	-3.77E-07	4.33E-07	-0.869950	0.3883
PENDUDUKMISKIN	-0.004482	0.005090	-0.880486	0.3826
PNDPTNDAERAH	1.45E-09	2.24E-10	6.492425	0.0000
SEDEKAH_INFAQ	-2.68E-10	1.85E-10	-1.453721	0.1520
ZAKAT	2.40E-11	3.56E-11	0.674859	0.5028

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.795551	Mean dependent var	4.248276
Adjusted R-squared	0.661873	S.D. dependent var	2.846548
S.E. of regression	1.655230	Akaike info criterion	4.135691
Sum squared resid	142.4689	Schwarz criterion	5.127723
Log likelihood	-144.9025	Hannan-Quinn criter.	4.535151
F-statistic	5.951243	Durbin-Watson stat	0.636858
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari output diatas dapat dijelaskan secara simultan seluruh variable bebas yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pilar 3 pembangunan ekonomi inklusif. Hal ini dapat dilihat dari nilai Prob(F-

statistic) sebesar 0,0000 mengindikasikan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Pilar 3. Secara parsial, hanya variabel Pendapatan Daerah yang berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% (p-value 0,0000). Koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah berkorelasi dengan peningkatan nilai indeks Pilar 3. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik, kesempatan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Dengan kata lain, semakin besar kemampuan keuangan daerah, semakin besar pula peluang pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan akses dan kesempatan bagi masyarakat.

Sementara itu, variabel Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), zakat fitrah, jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, jumlah penduduk miskin, sedekah/inafaq, dan zakat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Pilar 3. Meskipun beberapa variabel memiliki arah koefisien yang konsisten dengan teori, seperti jumlah penduduk miskin dan PDRB yang bernilai negatif, pengaruhnya belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi indeks secara parsial dalam periode penelitian yang relatif singkat. Ketidaksignifikanan dana sosial keagamaan dapat menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap perluasan akses dan kesempatan masih terbatas atau belum terintegrasi secara optimal dengan program pembangunan daerah.

Nilai Durbin-Watson sebesar 0,636858 mengindikasikan adanya potensi autokorelasi positif, yang menunjukkan bahwa nilai indeks pada suatu periode cenderung berkorelasi dengan periode sebelumnya. Kondisi ini wajar dalam indikator pembangunan sosial-ekonomi yang bersifat persisten dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Pilar 3, faktor kapasitas fiskal daerah merupakan determinan utama dalam mendorong perluasan akses dan kesempatan, sementara variabel dana sosial keagamaan dan indikator ekonomi lainnya belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individual selama periode pengamatan.

Hasil regresi panel pada Pilar 3 menunjukkan bahwa hanya variabel pendapatan daerah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks perluasan akses dan kesempatan, sementara variabel dana sosial keagamaan seperti zakat, zakat fitrah, sedekah/inafaq, serta variabel ekonomi seperti PDRB dan jumlah penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Temuan ini sejalan dengan literatur pembangunan daerah yang menekankan pentingnya kapasitas fiskal dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Berbagai studi dalam ekonomi publik menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah menentukan kualitas dan cakupan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan argumen bahwa perluasan akses dan kesempatan lebih banyak ditentukan oleh kapasitas anggaran dan kebijakan fiskal daerah dibandingkan oleh besaran output ekonomi semata.

Di sisi lain, ketidaksignifikanan dana sosial keagamaan dalam memengaruhi Pilar 3 tidak sepenuhnya bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Sejumlah studi menemukan bahwa zakat dan instrumen filantropi Islam lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan dasar dibandingkan secara langsung memperluas akses layanan publik struktural. Hal ini dapat dipahami karena dana sosial keagamaan umumnya bersifat bantuan langsung atau program pemberdayaan terbatas, sehingga dampaknya terhadap indikator akses dan kesempatan yang bersifat struktural membutuhkan integrasi dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Dengan kata lain, redistribusi sosial melalui zakat dapat membantu individu atau rumah tangga, tetapi perluasan akses publik yang lebih luas tetap memerlukan dukungan kapasitas fiskal dan investasi pemerintah.

Selain itu, tidak signifikannya PDRB dalam model menunjukkan bahwa besarnya aktivitas ekonomi suatu daerah tidak secara otomatis menjamin pemerataan akses terhadap layanan dan kesempatan ekonomi. Literatur pembangunan inklusif menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa kebijakan yang berpihak pada pemerataan dapat menghasilkan ketimpangan akses. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam konteks kabupaten/kota, peran pemerintah daerah melalui pengelolaan pendapatan dan kebijakan fiskal lebih menentukan dalam mendorong inklusivitas akses dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi agregat semata.

Hasil estimasi regresi data panel menggunakan pendekatan **Fixed Effect Model (FEM)** dengan efek tetap antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan. Nilai R-squared sebesar 0,795551 dan Adjusted R-squared sebesar 0,661873 menunjukkan bahwa sekitar 66,18% variasi Indeks Pilar 3 dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik dalam menggambarkan variasi perluasan akses dan kesempatan antar daerah selama periode 2019–2022.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat argumen bahwa pembangunan ekonomi inklusif, khususnya pada dimensi perluasan akses dan kesempatan, sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah dan efektivitas kebijakan publik, sementara peran dana sosial keagamaan lebih dominan pada aspek pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan langsung masyarakat.

KESIMPULAN

Secara komparatif, hasil regresi panel pada ketiga pilar menunjukkan pola yang menarik terkait determinan pembangunan ekonomi inklusif di tingkat kabupaten/kota. Pada **Pilar 1 (Pertumbuhan Ekonomi)**, variabel yang signifikan adalah Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) berpengaruh negatif dan zakat fitrah berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen dana sosial keagamaan memiliki peran dalam dimensi pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak seluruh komponennya berdampak positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas distribusi dan orientasi penggunaan dana sosial menjadi faktor penting dalam menentukan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berbeda dengan Pilar 1, pada **Pilar 2 (Kemiskinan dan Ketimpangan)** hanya variabel pendapatan daerah yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, kapasitas fiskal pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam memperbaiki indikator kemiskinan dan ketimpangan. Variabel dana sosial keagamaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial dalam

model ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbaikan struktural dalam distribusi kesejahteraan lebih banyak ditentukan oleh kebijakan fiskal dan program pemerintah daerah dibandingkan oleh instrumen filantropi keagamaan secara langsung.

Pola yang sama juga terlihat pada **Pilar 3 (Perluasan Akses dan Kesempatan)**, di mana pendapatan daerah kembali menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan konsistensi bahwa dimensi akses terhadap layanan publik, kesempatan ekonomi, dan infrastruktur sosial sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, variabel PDRB, jumlah penduduk, dan dana sosial keagamaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, yang mengindikasikan bahwa besarnya aktivitas ekonomi atau distribusi bantuan sosial tidak secara otomatis memperluas akses tanpa dukungan kebijakan fiskal yang memadai.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dimensi pertumbuhan ekonomi (Pilar 1) relatif lebih sensitif terhadap instrumen dana sosial keagamaan, sedangkan dimensi kemiskinan, ketimpangan, serta perluasan akses (Pilar 2 dan 3) lebih dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi inklusif di kabupaten/kota tidak hanya memerlukan redistribusi sosial berbasis keagamaan, tetapi juga sangat bergantung pada kekuatan kebijakan fiskal dan tata kelola anggaran daerah. Temuan ini menegaskan bahwa peran dana sosial keagamaan dan kebijakan fiskal bersifat komplementer: dana sosial dapat memperkuat dimensi kesejahteraan mikro dan pertumbuhan, sementara kapasitas fiskal pemerintah daerah menjadi motor utama dalam memperluas akses dan mengurangi ketimpangan secara struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R., & Khasanah, U. (2019). The effect of regional fiscal capacity and government expenditure on poverty in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(2), 150–161. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol11.iss2.art5>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST model as measurement of poverty and welfare indices from Islamic perspective. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using the CIBEST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Haq, M. S. (2025). Zakat Distribution Concentration on Poverty Alleviation: A Spatial Analysis. DOI: <https://doi.org/10.37706/ijaz.v10i1.660>
- Hasanah, U., Rahmawati, N., & Pratama, A. (2025). The role of productive zakat in strengthening regional economic growth in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.28918/jief.v11i1.10383>
- Majid, R. M., & Gissay, A. (2024). Evaluating the Impact of Zakat on Inclusive Growth. DOI: <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol5no2.190>

- Mohammad Nizarul Alim, Abidin, Z., & Rachman, M. A. (2020). The role of zakat in poverty alleviation and economic development: Evidence from Indonesia. *International Journal of Zakat*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.22>
- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Zakat revenue and poverty reduction in Aceh Province. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 188–195. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>
- Nusapati, A. I., Bahri, E. S., & Bayinah, A. N. (2019). The measurement of social value impact of ZISWAF using the Social Return on Investment (SROI) approach. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(1), 17–30. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.13021>
- Safitri, F. I., Maski, G., Noor, I., & Kuncoro, A. W. (2024). *The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah in Indonesia's Economic Growth*. DOI: <https://doi.org/10.22219/jes.v9i1.30217>
- Safitri, D., Huda, N., & Firmansyah, I. (2024). The impact of zakat, infaq, and sadaqah on economic growth and social welfare in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 123–138. <https://doi.org/10.22219/jes.v9i2.30217>
- Siregar, S. W., Jasman, Z. R., & Indarningsih, N. A. (2024). *Sustainable Impact of Zakat, Infaq, and Sadaqah on Multidimensional Poverty and Enhancing Economic Growth in 34 Indonesian Provinces*. DOI: <https://doi.org/10.18196/jiebr.v5i2.350>
- Siregar, R., Wahyudi, T., & Amalia, S. (2025). Zakat, infaq, sadaqah, and multidimensional poverty: Evidence from panel data in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business Research*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v5i1.350>
- Sodik, J. (2017). Fiscal decentralization and regional inequality in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/jep.v18i1.3457>
- Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2013). The role of zakat in reducing poverty and income inequality in Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17(1), 108–127. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i1.269>
- Uula, M. M., & Maziyyah, N. (2023). Zakat efficiency measurement in Indonesia: Evidence from 2016–2022. *Islamic Social Finance*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.58968/isf.v3i1.235>
- World Bank. (2018). *Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the poverty puzzle*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1330-6>